

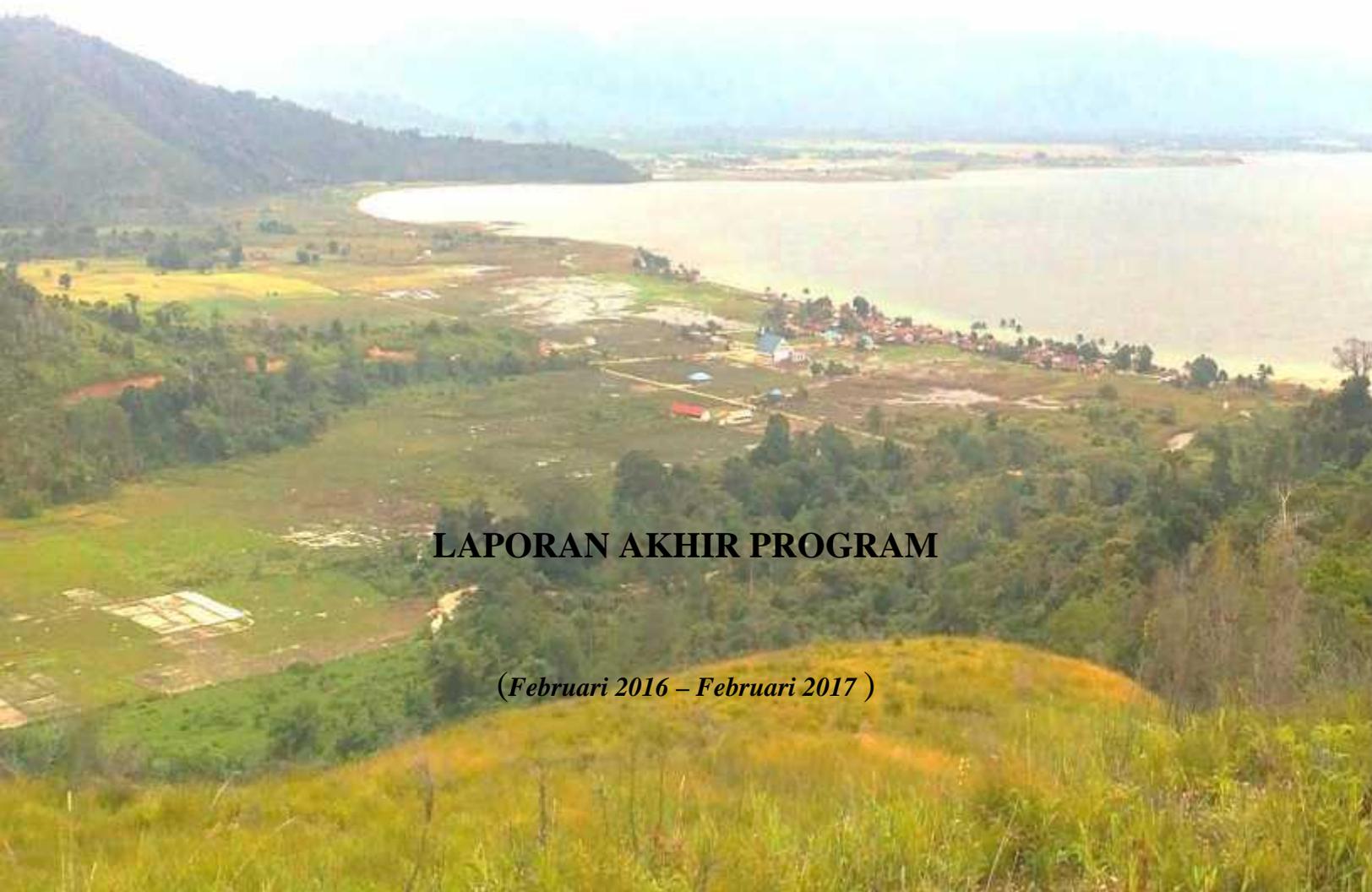


PROGRAM PEMBANGUNAN KOLABORASI
UNTUK PENGELOLAAN DANAU POSO
YANG BERKELANJUTAN

Karsa Institute

LAPORAN AKHIR PROGRAM

(Februari 2016 – Februari 2017)



I. INFORMASI PROGRAM

Wilayah Pendanaan	:	Danau Poso dan Kompleks Danau Malili
KBA	:	Danau Poso
Strategic Direction(s)	:	arahan strategis (2). Perlindungan Tapak, dan arahan strategis (5). Pelibatan sektor swasta dalam pelestarian keaneka ragaman hayati.
Nama Proyek	:	Program Pembangunan Kolaborasi Untuk Pengelolaan Danau Poso Yang Berkelanjutan
Nomor Laporan		02
Periode waktu	:	Juli 2016 – Februari 2017 (12 Bulan)
Disampaikan oleh	:	Rahmat Saleh
Tanggal	:	16 Februari 2017
Hibah CEPF	:	(a). 18.233,23 USD (Rp 13.000 per USD) (b). Rp 237.032.000
Kontribusi Mitra		Rp 61.660.000
<u>Kontribusi donor (program) lain (jika ada):</u>		
<u>Periode program:</u> (contoh)		Februari 2016 – Februari 2017 (12 Bulan)
Lembaga pelaksana		Karsa Institute

II. RINGKASAN

Pada periode ini kegiatan difokuskan pada dua hal yaitu ; penyelesaian prasyarat-prasyarat negosiasi dengan sektor swasta dan pembangunan kesepakatan kerjasama. Pembangunan prasyarat dimaksud meliputi penyiapan sosial, yaitu peningkatan pemahaman, pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kerjasama multi pihak dalam pengelolaan danau Poso, dan serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melakukan Lobby dan negosiasi. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuatan dalam proses negosiasi, sehingga kolaborasi yang diharapkan terbentuk adalah kolaborasi yang egaliter, bukan kolaborasi "Semut dengan Gajah". Disamping itu penyiapan prasyarat juga dilakukan dengan memperkuat basis data, yang diharapkan dapat disediakan dari study imbal jasa lingkungan.

Pada saat yang sama, upaya untuk memperkuat pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan, juga terus dilaksanakan ditingkat tapak. Dengan memperkuat perspektif, kelembagaan serta meningkatkan kesadaran. Hal ini dilakukan untuk merespon, reaksi positif masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelestarian danau Poso, setidaknya dalam konteks ruang mereka. disamping itu, hal ini juga diupayakan dengan kesadaran bahwa upaya pelestarian danau harus dibangun, dipelihara dan terus ditingkatkan, semakin banyak pola yang bersinergi, semakin baik. pengelolaan danau Poso tidak boleh bergantung pada kehendak, kebaikan hati satu pihak, tapi kehendak setiap pihak.

dalam rangka mendorong terlaksanakannya Kolaborasi Pengelolaan Danau Poso, sejak dimulai hingga menjelang akhir periode Proyek, karsa relatif efektif dalam mendorong pelibatan para pihak terutama Desa, Sekolah (SLTA), Kelompok Pecinta Alam, Beberapa Akademisi, Organisasi gereja GKST, serta pemerintah kecamatan. Satu-satunya stake holder yang belum terlibat secara penuh adalah sektor swasta. Ada beberapa kelompok usaha disekitar danau, misalnya usaha pariwisata dan kuliner, namun yang terbesar adalah PT Poso Energi. Oleh karena itu, Karsa menempatkan perusahaan ini sebagai target utama pembangunan kolaborasi. Oleh karena itu pada periode Juni – desember 2016, Karsa mulai mengintensifkan komunikasi dengan PT Poso Energi.

Pembangunan komunikasi dengan PT Poso Energi dibangun melalui berbagai pendekatan, mulai dari pertemuan informal, yang hanya melibatkan karsa dan manajemen Poso Energi, pertemuan informal yang melibatkan karsa, Tokoh Gereja, perwakilan masyarakat dan manajemen Poso Energi, hingga pertemuan formal dalam bentuk workshop yang melibatkan para pihak. Sampai sejauh ini, para pihak secara telah memiliki kesepakatan akan pentingnya upaya bersama dalam pelestarian danau Poso.

Secara lisan, para pihak juga telah memperoleh gambaran mengenai bentuk dan implementasi kesepakatan.

III. CAPAIAN

3.1. Objektif Project

Objektiv projec ini adalah sebagai berikut ;

“Kapasitas konservasi para pihak dalam pengelolaan danau Poso meningkat, baik dari aspek rencana, tindakan, aktor, maupun partisipasi, halmana memungkinkan penambahan luasan lahan dan hutan yang berfungsi lindung, peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sub DAS danau Poso, serta pengurangan tekanan terhadap spesies kunci di danau Poso”

Pencapaian objektif ini diindikasikan dengan indikator sebagai berikut ;

- 50 % dari wilayah administrasi desa ditetapkan menjadi areal perlindungan
- Kegiatan konservasi masuk dalam RPJMDesa dan frekwensi kegiatan berdampak pelestarian meningkat 100 %
- Pemerintah dan warga 3 desa target, PT. Poso energy, Perusahaan Wisata, Ormas Keagamaan sekolah dan perguruan tinggi setempat, melibatkan diri dalam agenda pelestarian danau poso

Indikator 1

Pencapaian objektif ini dapat dilihat dari adanya penetapan areal-areal perlindungan di dalam Rencana Tata Ruang Desa Dulumai, Sulewana dan Salukaia. Jika di-overlay dengan peta kawasan Hutan P.869/2014 maka terlihat bahwa cakupan luasan areal-areal perlindungan meliputi seluruh kawasan berfungsi Lindung, dan bahkan meluas ke areal-areal berstatus APL, dengan rincian masing-masing sebagai berikut ;

- Dulumai 668,38 Ha
- Salukaia 1590,49 Ha
- Sulewana 175 Ha

- Total 2433,87 Ha

Areal-areal di Lindung oleh desa tersebut merupakan WTA, yang bermuara ke ke Danau Poso maupun sungai Poso. Penetapan, areal-areal tersebut dilakukan secara partisipatif, dengan diskusi mengenai konsekuensinya. Penetapan ini, disadari masyarakat sebagai keputusan yang berakibat pada pembatasan kegiatan produksi maupun penggunaan lahan pada areal dimaksud. Dimana masyarakat, melalui kelembagaan desa, memiliki tanggung jawab untuk menegakannya. Saat ini RTRDesa masih berstatus Draft, (dan telah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017).

dan akan ditetapkan menjadi PERDES setelah pemilihan kepala desa yang berlangsung pada bulan November 2016. Kendatipun pemilihan kepala desa, berlangsung pada Bulan November, masa bhakti kepala desa telah berakhir pada bulan Oktober 2016. Sejak itu, Jabatan Kepala desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Kewenangan Plt tidak seluas, kepala Desa definitif. Plt Kepala Desa tidak berwenang menetapkan Peraturan Desa maupun Perkadades, kecuali, peraturan desa yang sifatnya reguler. Misalnya perdes tentang penetapan RKP Desa ataupun APBDesa. selama kurun waktu itu, pembahasan Perdes RTR Desa tidak dapat dilakukan. Untuk kemudian dapat dilanjutkan kembali pada bulan Januari 2017, selepas pelantikan Kepala Desa Terpilih yang telah dilaksanakan pada awal bulan Januari 2017.

Dengan demikian, Pembahasan Perdes baru efektif dilakukan pada minggu pertama Januari 2017, dan dapat disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, pada tanggal 14 Januari 2016, setelah itu. Meskipun demikian perdes belum dapat berlaku karena harus melalui evaluasi dan klarifikasi oleh pemerintah kabupaten, yang memakan waktu paling lama 20 Hari Kerja. Berdasarkan informasi pada 27 Februari 2017, Bagian Hukum Kabupaten telah menginformasikan bahwa Perdes memenuhi syarat untuk diterbitkan karena tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Sehingga dengan demikian Perdes tersebut telah dapat diundangkan di Desa Dulumai, Salukaia dan Sulewana.

Indikator 2

Untuk memastikan masuknya kegiatan konservasi di dalam RPJM Desa, maka Karsa Institute mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyusunan RPJM Desa di desa Dulumai, Salukaia dan Sulewana. Kebetulan di kabupaten lain (Sigi) Karsa pernah mengembangkan suatu Tools fasilitasi RPJM Desa, yang mana Tools tersebut diadopsi oleh BAPPEDA dan dipergunakan dalam memfasilitasi dan asistensi penyusunan RPJMDesa. Masuknya agenda aksi Konservasi dimuat pada BAB IV, Bagian 4.2. Kebijakan Pembangunan, Sub Bagian 4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan. Selanjutnya detail program dan kegiatannya urai pada lampiran 6 Rancangan RPJM Desa.

Pada bagian itu, disebutkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan maka desa menetapkan areal-areal perlindungan desa. kemudian untuk memberikan akses pengelolaan terhadap areal yang berstatus Hutan Negara maka Desa akan mengusulkan Hutan desa, dan mengintegrasikan areal-areal dimaksud kedalam Zona perlindungan di dalam Hutan Desa. Untuk menjamin berfungsinya kelembagaan pengelolaan maka desa akan mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator 3

Indikator 3 adalah Penguatan peran para pihak yang terdiri dari ;

1. pemerintah dan warga di 3 desa,
2. PT Poso Energi
3. Perusahaan Wisata
4. Ormas Keagamaan
5. Lembaga Pendidikan (SLTA dan PT setempat)

Peran para pihak dimaksud dalam agenda pelestarian Danau Poso telah dicapai dengan tingkat pencapaian yang bervariasi. Pada tingkat desa (pemerintah dan masyarakat desa) tujuan dimaksud dapat dicapai dengan efektif. Capaian terlihat dari berkembangnya perubahan persepsi, berkembangnya kebijakan desa, yang berorientasi pada pelestarian danau Poso. Hal ini merupakan perubahan penting, karena sebelum proyek ini, desa cenderung tidak memiliki interest terhadap pelestarian Danau. Peningkatan juga terjadi pada lembaga pendidikan terutama pada tingkat SMA. Dimana kepala sekolah SMA 1 Tentena, terlibat aktif didalam program ini. kelompok Pecinta Alam Sandikala, di SMA tersebut, telah memulai kegiatan-kegiatan yang lebih sistematis dan programatik dalam mengupayakan pelestarian danau Poso. Ivent-ivent kampanye mereka susun, bahkan, dengan asistensi karsa institute mereka, telah memproduksi satu film kampanye danau Poso, yang diikuti dalam lomba film dokumenter tingkat SMA dan memperoleh juara II. Hal yang sama, dicapai pada Perguruan Tinggi setempat, STT Tentena. Dua orang tenaga pengajar di PT ini cukup intens dalam mengikuti berbagai pertemuan dan diskusi yang berhubungan dengan danau Poso. Ada rencana untuk menginternalisasi agenda ini kedalam PT, terutama dengan mengintervensi penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan di sekitar danau Poso.

Sektor privat di sekitar danau Poso bergerak pada usaha Pariwisata dan Energy. Untuk kegiatan disektor pariwisata, usaha utama adalah Homestay, tempat hiburan dan kuliner. Sementara itu, disektor energi, terdapat PT Poso Energi yang bergerak disektor Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Capaian pada privat sektor, relatif kecil dibandingkan dengan pihak lainnya. pada privat sektor yang bergerak disektor pariwisata, intervensi sama sekali belum dilakukan. Dimana keterbatasan waktu dan sumberdaya, menyebabkan karsa harus memprioritaskan pemangku kepentingan lainnya terlebih dahulu. Terlebih, eksistensi dan profitabilitas sektor ini sangat rendah, akibat lesunya pariwisata Poso, sebagai imbas dari konflik.

Sementara intervensi terhadap PT Poso Energi sudah cukup intensif dilakukan, dengan capaian yang kurang optimal. Penyebabnya lebih pada faktor internal pada PT Poso Energi sendiri, misalnya ;

1. Rantai Manajemen dan pengambilan keputusan yang begitu panjang. dalam pengambilan pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk dapat bernegosiasi, dengan pihak lain, harus dilakukan se"izin" komisaris perusahaan yang berbasis di Jakarta.
2. Kendatipun menyadari kewajiban CSR PT Poso Energi, beralih bahwa mereka secara legal belum sepenuhnya dapat dikenakan kewajiban untuk menyisihkan 2% keuntungan bersih untuk CSR karena, mereka sendiri belum *breakevent*, dimana PLTA juga belum efektif beroperasi, karena baru bisa mengoperasikan 1 dari 3 pembangkit, dan dalam proses pembangunan turbin ked-2.

Dalam konteks ini, Divisi Komdev PT Poso Energi, menyatakan, walaupun nanti, Poso Energi menyepakati suatu bentuk kerjasama dengan Desa, maka kesediaan itu, merupakan "kebijaksanaan" perusahaan, dan tidak dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban hukum, meskipun dengan sendirinya hal itu akan menggugurkan kewajiban hukum.

3. PT Poso Energi, mengaku telah cukup banyak membayarkan pengeluaran "non operasional" kepada para pihak, baik dalam rangka kontestasi politik, sumbangan sosial keagamaan dsb. Sehingga alokasi biaya sosial sesungguhnya sudah dikeluarkan kendatipun tidak langsung kemasyarakat, tapi kepada elite. Itu sebabnya posisi tawar pemerintah daerah sangat lemah dalam menekan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya;
4. PT Poso Energi masih memiliki tunggakan janji, kepada sejumlah desa, yang diberikannya untuk memperoleh izin dan dukungan untuk berinvestasi di Sulewana
5. PT Poso Energi mengaku telah memiliki kegiatan-kegiatan Sosial dan Lingkungan meskipun masih bersifat sporadis dan skala kecil.

Meskipun demikian, upaya pembangunan kolaborasi dengan PT Poso Energi, cukup memberikan hasil kendatipun belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak. Hasil dimaksud antara lain ;

1. PT Poso Energi, sepakat dan sepaham bahwa keberlanjutan investasi mereka sangat tergantung pada keberlanjutan fungsi ekologis danau Poso, dimana peran masyarakat sangat krusial untuk menjaga dan memastikannya.
2. PT Poso Energi tertarik dan setuju untuk bekerjasama, terutama karena pilihan-pilihan kerjasama yang ditawarkan dinilai inovatif, akuntabel, tidak membebani dan bersifat mutualis. Pilihan dimaksud misalnya ;
 - Realisasi IJL tidak selalu harus berbentuk kompensasi financial, dimana masyarakat juga memberikan opsi berupa ; peningkatan kapasitas, pembentukan pasar hasil pertanian terutama penyerapan produk tanaman pangan dan hortikultura, yang selama ini display PT Poso Energi dari pihak luar

- Walaupun kompensasi finansial maka pembayarannya oleh desa akan dicatatkan sebagai hibah yang dicatatkan sebagai pendapatan desa di dalam APBdesa, dan dibelanjakan untuk kegiatan konservasi
- Relisasi dapat berupa kegiatan kerjasama yang direncanakan dan diselenggarakan bersama misalnya ; rehabilitasi lahan kritis
- Kerjasama ini diakui dapat menciptakan “good image” PT Poso Energi

Jadi secara prinsip, PT Poso Energi telah dapat menerima konsep kerjasama yang ditawarkan, namun persetujuan atas kesepakatan ini, biar bagaimanapun menerutu mereka harus diketahui dan disetujui oleh komisaris di Jakarta. Olehnya majamen Poso Energi berjanji untuk membawa usulan ini kedalam Rapat direksi perusahaan.

A. Output

Project ini terdiri dari 2 (dua) output ;

1. Adanya Kesepakatan Penataan Ruang yang mengalokasikan ruang perlindungan dan ditetapkan sebagai penetapan areal/kawasan perlindungan serta rencana kerja dan pilot kegiatan oleh pemerintah desa yang terintegrasi kedalam RTR Desa, Renstra danau Poso, RK SKPD, UPT dan swasta
2. Adanya Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Danau Poso yang berkelanjutan antara pihak swasta (PT Poso Energi) dengan desa, dalam kerangka mekanisme imbal jasa lingkungan atau Payment Environmental system (PES)

Output 1

Secara umum Output 1 telah dicapai oleh program ini, kecuali proses integrasi dengan Renstra Danau Poso.

Indikator output 1 adalah :

- 3 peta RTR Desa memuat lokasi perlindungan
- 3 Perdes RTR Desa dibahas dan ditetapkan

Kedua indikator dimaksud telah dicapai, dimana lokasi-lokasi area perlindungan telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) dengan luasan

pada masing-masing desa adalah sebagai berikut ;

- Dulumai 668,38 Ha
- Salukaia 1590,49 Ha
- Sulewana 175 Ha
- Total 2433,87 Ha

Keberadaan area perlindungan itu telah ditetapkan melalui Perdes, sejalan dengan penetapan Perdes RTRDesa.

Untuk memberi kekuatan hukum terhadap RTR Desa, maka disusunlah Ranperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang Perencanaan Tata Ruang Desa. Draft Perdes tersebut dirumuskan oleh Tim Fasilitasi bersama-sama dengan Pemerintah desa, dan diajukan menjadi Ranperdes, melalui inisiatif Kepala Desa, pada bulan Juli 2016. Pembahasan bersama BPD baru dimulai pada bulan Oktober 2016, namun tidak begitu efektif lagi karena, suasana politik di dalam desa, yang mulai dipengaruhi kontestasi politik PILKADES. Hal ini menyebabkan Pembahasan Perdes terhenti dan baru dapat dilanjutkan kembali pada bulan Januari 2017, setelah pelantikan Kepala Desa.

Berdasarkan informasi terakhir, saat ini perdes tersebut telah ditetapkan, setelah melalui masa evaluasi dan klarifikasi, setelah melalui masa evaluasi dan klarifikasi di Bagian Hukum Kabupaten Poso. sehingga dengan demikian 3 Peta RTR Desa telah ditetapkan melalui Perdes.

Pemenuhan indikator ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

1. Rapid Assesment di desa Sulewana, Salukaia dan Dulumai

a. Pertemuan Desa

Pertemuan dan audiensi dengan kepala desa Sulewana, Salukaia dan Dulumai, dilaksanakan dalam dua kali pertemuan di kantor dilaksanakan pada bulan maret 2016. Pertemuan ini dilaksanakan dalam suasana informal dihadiri oleh perangkat desa Sulewana. Materi pembahasan dalam pertemuan ini adalah :

- a. Kesepakatan waktu dan peserta FGD.
- b. Penjelasan mengenai proses dan keluaran program.

b. Pertemuan pengalihan informasi FGD

Pengalihan informasi dilaksanakan dengan metode FGD. Peserta yang hadir mewakili unsur pemerintah desa, BPD, Karang Taruna, Lembaga Adat, PKK, dan tokoh pemuda. Ada 5 tema yang didiskusikan pada kegiatan yakni : 1) tingkat kesejahteraan masyarakat, 2) Analisa kondisi wilayah yang mencakup luasan, letak, dan penggunaan lahan) 3). Masalah dasar yang terjadi berulang-ulang melalui metode analisa kalender musim 4). Analisa peran dan pengambilan keputusan, serta 5) analisa masalah dan pemecahannya. Proses cukup dinamis dengan banyaknya masalah yang diungkapkan oleh peserta.

c. Obeservasi dan wawancara

Desa Sulewana diberada di kecamatan Pamona Utara. Wilayahnya terdiri atas dataran dan sebagian berbukit hingga bergunung. Dilalui oleh sungai poso, desa Sulewana mengadakan sektor pertanian sebagai mata pencarian utama. Ragam etnis yang berdomisili di desa Sulewana di dominasi oleh etnis pamona.

i. Orientasi Sosial

Diskusi dengan berbagai lapisan masyarakat ; tokoh agama, masyarakat, pemuda dan juga perempuan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Pembinaan LPMD di desa Sulewana utamanya menyangkut pelaksanaan program pembangunan di desa berjalan cukup baik terbukti dengan adanya partisipasi pengurus yang ada untuk memfasilitasi segala kegiatan menyangkut pembangunan utamanya Musrembang Desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan hasil rekapitulasi Musrembang desa untuk pengajuan ke tingkat kecamatan.

Eksistensi lembaga adat berjalan cukup baik utamanya menyangkut perselisihan masyarakat baik di tingkat RT, dusun, sampai ke tingkat desa kesemuanya berjalan dengan baik.

Capaian :

- Memahami susunan sosial-ekonomi masyarakat di desa, kelembagaan di dalam desa dan tokoh kunci serta peran para aktor di dalam desa.
- Memahami kedudukan kelembaga di setiap desa tentang pandangan masyarakat mengenai kelebihan dan kekurangan.
- Memperoleh gambaran masyarakat tentang harapan dan kebijakan tentang pengelolaan danau poso yang berkelanjutan.

a. Pengumpulan data dasar

Data dasar desa yang dikumpulkan selama orientasi dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi informal dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda. Informasi yang dikumpulkan meliputi :

Keadaan Jumlah penduduk Desa Sulewana pada akhir tahun 2015 sesuai dengan hasil Pemuktahiran Data pada buku Profil Desa Sejumlah 1.921 jiwa dengan jumlah KK 553 dengan kepadatan penduduk 7 org / km dengan mata pencaharian yang dominan adalah Petani sawah mencapai 60% Pekebun Kakao sebesar 38%, dan PNS / Karyawan Swasta 2%.

Pemerintahan Keadaan sarana dan prasarana Desa Sulewana sudah cukup memadai. Ini didukung dengan adanya kerjasama antara unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa (BPD) dan Kepala Desa serta perangkat desa lainnya.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Sulewana pada akhir tahun 2015 terdiri dari pendidikan usia dini (PAUD), TK, SD, dan SMP negeri satu atap yang mana proses belajar mengajar di sekolah ini utamanya SD dan SMP satu atap, belum berjalan maksimal disebabkan karena masih kekurangan guru pegawai negeri sipil yang hanya berjumlah enam orang termasuk kepala sekolah.

Keadaan kesehatan masyarakat pada akhir tahun 2014 cukup baik. Hal ini didukung oleh adanya kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa dan petugas kesehatan desa yang telah berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat yang sebaik-baiknya tanpa mengenal waktu.

Partisipasi masyarakat di desa Sulewana utamanya menyangkut partisipasi gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kerja bakti seminggu sekali di lingkungan RT masing-masing yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan dipadukan dengan program lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dalam pelaksanaan pengembangan partisipatif, swadaya, kerja bakti masyarakat.

Capaian : Tersedianya data dasar desa sebagai basis untuk mengkaji kondisi desa baik untuk keperluan perencanaan, penyusunan dokumen maupun perumusan pendekatan dan kebijakan.

2. Pemetaan Partisipatif untuk penataan ruang

Pemetaan partisipatif dan rencana penataan ruang menjadi areal berdasarkan peruntukan dan fungsi untuk keperluan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemukiman, perkebunan dan ruang bagi infrastruktur. Penataan areal dimaksudkan untuk menata bagian pelestarian dan pemanfaatan. Penataan areal dilakukan dengan tahapan :

a. Pembentukan tim kerja

Pembentukan tim kerja pemetaan partisipatif desa Sulewana didasarkan atas rekomendasi dari hasil FGD sebelumnya. Setelah melakukan koordinasi terbentuk tim pemetaan partisipatif dan penataan ruang terdiri dari tiga unsur yakni : petugas teknis dari Karsa Institute, kepala dusun, dan tokoh pemuda. Setelah tim terbentuk dilakukan persiapan lapangan yang meliputi pengumpulan alat, pembagian tugas masing-masing anggota tim dan perencanaan waktu kegiatan.

b. Pembuatan rencana batas dan sketsa peta

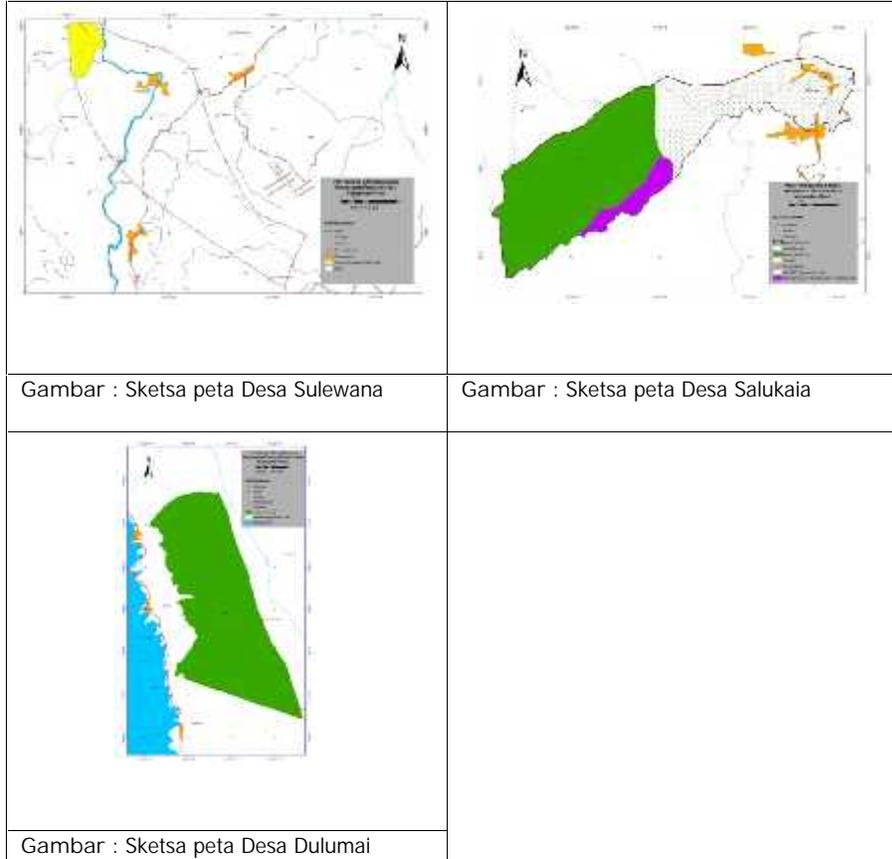
Untuk mempermudah kerja lapangan dilakukan briefing tim untuk mematangkan rencana lapangan. Dalam perencanaan ini ditentukan titik 0 pengukuran dan sketsa jalur serta

sketsa peta yang bersumber dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 terbitan Bakosurtana tahun.

c. Pembuatan peta dasar (sketsa)

Hasil pengukuran lapangan ditransfer kedalam data pembuatan peta digital menggunakan arcGis. Melalui program ini dilakukan peta desa Sulewana dibuat berdasarkan data-data lapangan. Setelah peta digital dibuat, masih diperlukan verifikasi kembali dengan pemerintah desa sebelum mendapat pengesahan.

Gambar : Draft Pet, , a Desa Sulewana, Salukaia dan Dulumai



Peta dasar yang telah digambarkan kemudian diverifikasi melalui pertemuan desa yang melibatkan berbagai unsur dimasyarakat. Hasil verifikasi dan konsultasi desa, selanjutnya dikonsultasikan lagi dengan desa-desa yang berbatasan dengan desa yang menjadi sasaran program.

Beberapa tindak lanjut dari hasil konsultasi ini adalah ; membuat berita acara batas desa yang diajukan ke pemerintah kecamatan.

Output 2 proyek ini adalah ; Adanya Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Danau Poso yang berkelanjutan antara pihak swasta (PT Poso Energi) dengan desa, dalam kerangka mekanisme imbal jasa lingkungan atau Payment Environmental system (PES)

Dengan indikator ;

Adanya kesepakatan, skema kerjasama dan IJL, antara PT Poso Energy dan Desa

Untuk mencapai tujuan ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi ;

3. Pembentukan Tim Representasi Desa

Pembentukan Tim representase desa Sulewana, Salukaia dan Dulumai dilaksanakan melalui rapat dengan Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh pendamping program. Selain membentuk tim, juga didiskusikan uraian tugas dan tanggung jawab kelompok. Jumlah tim terdiri 10 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing unsur masyarakat. Keberadaan tim representase desa diharapkan mampu menjadi perwakilan masyarakat desa Sulewana dalam bernegosiasi, mengikuti proses perumusan skema imbal jasa lingkungan serta menjaring aspirasi dari masyarakat.

4. Pertemuan dengan stakeholders kunci

a. Pertemuan dengan staff comdev PT. Poso Energi

Sampai dengan bulan mei 2016, pertemuan dengan pihak Poso Energi telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertemuan ini lebih dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam pelestarian lingkungan.

Pertemuan dilakukan kembali pada bulan juli dan agustus 2016. Setelah itu pertemuan tidak pernah lagi dilakukan, karena terjadi rotasi manajemen di dalam PT Poso Energi saat itu, manajer Comdev yang selama ini menjadi kontak person, sempat dimutasi keluar daerah, dan ditempatkan lagi di Poso, pada bulan desember 2016. Intensitas pertemuan terjadi di bulan januari dan meningkat drastis di bulan Februari 2017.

Metode pertemuan dilakukan secara informal mendiskusikan berbagai model keterlibatan swasta dalam pengelolaan lingkungan. Rujukannya diambil dari berbagai pengalaman swasta ditempat lain dalam pengelolaan dana CSR.

Melalui pertemuan ini pula pelaksana program mendapatkan gambaran dan kondisi internal di poso energi. Hambatan komunikasi dengan poso energi adalah, adanya pergantian koordinator community development yang dulunya memberikan komitmen dukungan terhadap program. Menghadapi kendala ini pelaksana program melakukan diskusi-diskusi informal dengan vocal point di comdev serta menggalang dukungan dengan berbagai pihak diluar poso energi.

b. Pertemuan tingkat Sinode GKST

Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang berpusat di Tentena – Kecamatan Pamona Puselembah adalah organisasi gereja yang sangat berpengaruh dan memiliki basis luas diwilayah Sulawesi Tengah, yang memiliki peran-peran

menumbuhkembangkan pelayanan gereja. Dalam berbagai hal, terutama saat konflik poso pecah, peran Sinode GKST cukup penting dalam mendorong perdamaian. Atas dasar peran-peran yang dimainkan oleh GKST selama ini, pelaksana program menempatkan posisi GKST sebagai mitra yang strategis dalam mendorong pemahaman dan keterlibat dalam aspek sosial. Pertemuan dengan Sinode GKST dilaksana secara informal dalam suasana kekeluargaan. Dalam kurun waktu program, telah dilaksanakan dua kali pertemuan. Point-point pembicaraan dengan Sinode GKST adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat/jemaat dalam upaya pelestarian danau poso. Hal yang lain adalah GKST akan membantu melakukan lobbying dengan perusahaan poso energi tentang pentingnya terlibat dalam pengelolaan danau poso yang lestari.

c. Pertemuan dengan Fraksi Gerindra DPRD Poso

Sebagai usaha melakukan perluasan jaringan dan dukungan atas program pelestarian danau poso, pelaksana program juga melakukan pertemuan dengan salah fraksi di DPRD Kabupaten Poso. Pertemuan dengan fraksi Gerindra DPRD kabupaten Poso, dilaksanakan di sekretariat DPC Partai Gerindra, dihadiri oleh pengurus partai dan Fraksi. Dua hal yang ingin dicapai dari pertemuan ini adalah : adanya dukungan politik terhadap rencana penerapan imbal jasa lingkungan disekitar danau poso dan menjajaki kemungkinan adanya regulasi (Perda) terkait dengan imbal jasa lingkungan di kabupaten Poso. Regulasi yang mengatur dan mengikat diharapkan bisa membangun konsep pengelolaan danau poso yang lestari.

d. Pertemuan dengan dinas Kehutanan kabupaten Poso

Sebagian besar desa yang berada disekitar danau poso merupakan desa yang memiliki hutan dengan status hutan lindung dan areal penggunaan lain (APL). Pertemuan dengan dinas kehutanan kabupaten poso dimaksudkan untuk mensinergikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana program yang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki fungsi lindung penting bagi pelestarian hutan. Selain itu disampaikan pula beberapa usulan masyarakat terkait dengan skema pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial.

5. Study Imbal Jasa Lingkungan

Study Imbal Jasa Lingkunga (IJL) Danau Poso mekanisme merupakan satu mekanisme yang dipromosikan dalam pengelolaan danau Poso yang berkelanjutan. Skema ini direncanakan melibatkan masyarakat yang bermukim disekitar danau Poso dan PT Poso Energi yang diikat dalam sebuah perjanjian yang di mediasi oleh Pemda Poso dan Karsa Institute.

Dalam implementasi IJL yang berkelanjutan paling tidak memenuhi aspek-aspek : realistic, voluntarily, conditional dan pro poor. Untuk memenuhi aspek tersebut, pelaksana program memulai sebuah study IJL yang diharapkan menjadi masukan bagi para pihak untuk

pengelolaan mekanisme IJL terutama dalam pengambilan keputusan dalam mengimplementasikan skema IJL yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat disekitar danau Poso. Kegiatan study ini dilaksanakan di enam desa disekitar danau Poso yakni : desa Salukaia, Sulewana, Dulumai, Meko, Taipa dan Peura.

Proses Study :

1. Dalam study IJL danau Poso, digunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Tujuan adalah menjelaskan faktor-faktor berpengaruh terhadap jalannya skema IJL. Analisa data dilakukan melalui analisi SWOT dan analisis kesejangan.
 2. Setelah pengumpulan data, dilakukan diskusi kelompok, wawancara. Kedua model pengumpulan data ini dilakukan dengan kelompok masyarakat dan pihak perusahaan.
 3. FGD – diskusi tematik dan terarah dilakukan untuk mendukung hasil SWOT dan faktor-faktor yang berpengaruh pada rencana implementasi IJL.
 4. Data yang dikumpulkan dikalsifikan dan kedalam faktor internal, maupun eksternal yang selanjutnya disimpulkan dalam strategi implementasi IJ.
5. Workshop Para Pihak Pengelolaan Danau Poso dalam kerangka kerja dan Kebijakan strategis Pemerintah Daerah

Keterlibatan para pihak dalam pengelolaan danau Poso, merupakan syarat mutlak bagi terbangunnya sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan para pihak, diharapkan mampu meningkatkan keseimbangan kontrol dan peran yang sama besar antara masyarakat, pemerintah dan masyarakat.

Dalam workshop ini, dibagi dalam tiga sesi yakni : 1. Pemaparan masing-masing unsur ; dari masyarakat, pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan danau Poso. 2 perumusan strategi pengelolaan danau poso dan 3. Perumusan rencana tindak lanjut dan rekomendasi.

1. Presentase : berbagai upaya pengelolaan danau Poso

- a. Pemaparan masyarakat diwakili oleh Kharisma Kolea kades Salukaia. Dalam pemaparannya disampaikan upaya-upaya masyarakat desa Salukaia dalam pelesatrian danau poso meliputi :
 - Sistem pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal, dimana terdapat fungsi kawasan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian,
 - Penataan daerah aliran sungai Meko, dimana daerah sempadan sungai ditanami dengan tanaman pelindung. Selain itu, pemerintah desa Salukai juga melakukan pengaturan pemanfaatan galian c (pasir dan batu di hulu sungai) melalui peraturan desa.

- b. Pemaparan Dinas Kehutanan Poso, disampaikan oleh Jhony Kirawan Kepala Bidang Perhutanan Sosial.
 - Dinas kehutanan kabupaten Poso melaksanakan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, melalui kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air di hulu sungai Meko.
 - Melaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan melalui ; pembuatan bibit/benih tanaman kehutan, dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.
 - Sementara untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan dilaksanakan kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu, khusus disekitar danau poso dikembangkan lebah madu hutan di desa Didiri.
 - Mendorong dan fasilitasi skema perhutanan sosial di desa Dulumai, yang merupakan salah satu desa target program dengan Burung Indonesia.
 - c. Pemaparan Swasta PT. Poso Energi, diwakili oleh Sonny Lempadeli Staf Comdev Poso Energi. Pointers yang disampaikan oleh Poso Energi adalah :
 - Komitmen Poso Energi dalam melestarikan lingkungan antara lain dengan membina petani didesa Sulewana.
 - Kegiatan bantuan kepada masyarakat berupa kebun bibit dan pertanian.
 - Kegiatan terkait pembukaan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat desa disekitar danau Poso.
 - Kesiadaan Poso Energi bekerjasama dalam pengelolaan lingkungan disekitar danau Poso.
2. Perumusan Strategi Pengelolaan Danau Poso.
Peserta di bagi dalam 3 group; group 1 membahas : upaya-tindakan yang strategis untuk pengelolaan danau poso. Group 2 membahas peran masing-masing pihak dan group 3 membahas rekomendasi workshop.
3. RTL dan Rekomendasi :
Rumusan Rencana Tindak Lanjut, memuat jenis kegiatan, dukungan sumberdaya, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan.
6. Workshop Multipihak : merumuskan mekanisme IJL danau Poso untuk pengelolaan danau Poso yang berkelanjutan
Salah satu pendekatan inovatif dalam pengelolaan DAS dan Danau adalah skema Imbal Jasa lingkungan. Dalam skema ini masyarakat yang mendiami wilayah hulu sungai dan tepian danau Poso dipandang sebagai pengambil keputusan penggunaan sumberdaya alam berkontribusi sebagai penyedia jasa lingkungan. Melalui keputusan merekalah daerah hulu sungai dan DAS menghasilkan kualitas lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Disisi lain, masyarakat luas dan pihak pengguna sumber daya alam terutama air danau Poso sebagai pemannfaat jasa lingkungan.

Workshop Multipihak; perumusan mekanisme Imbal jasa Lingkungan merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan pengelolaan danau Poso yang berkelanjutan yang didahului dengan study imbal jasa lingkungan dan workshop para pihak tentang strategi pengelolaan danau Poso.

Proses workshop multipihak dibagi dalam dua :

Sesi satu :seminar

Pembahasan dalam seminar berpangkal pada pengelolaan danau Poso dengan presentase dari narasumber ; hasil study imbal jasa Lingkungan disekitar danau Poso, Peran swasta dalam pengelolaan danau Poso dan Dinamika pengelolaan danau Poso yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Presentase dari nara sumber : 1. Jhon Lusikoy (tim study Imbal Jasa Lingkungan) 2. Pdt. Renaldy Damanik (tokoh masyarakat Poso/Rohaniwan) dan 3. Asrory (Manager Comdev PT Poso Energi)

Pdt. Renaldy Damanik, adalah Tokoh karismatik dan sangat berpengaruh di Poso, dalam workshop ini, iya menekankan bahwa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian danau Poso merupakan tanggung jawab Mulia yang dibebankan kepada umat manusia, terutama yang berdiam disekitar danau Poso. Dalam perspektif teologi, Ia menegaskan, bahwa keberadaan masyarakat yang ada di sekitar danau dapat terjadi karena dipercaya punya kemampuan untuk menjaga keberlangsungan danau Poso. Punya kemampuan untuk memelihara sumber-sumber kehidupan dan kehidupan yang dibentuk oleh sistem danau Poso., semua Punya tanggung jawab sesuai proporsinya. Dalam hal ini, ia menilai PT Poso Energi, adalah pihak dengan tanggung jawab terbesar, karena merupakan pemanfaat terbesar sumber air danau Poso.

Berawal dari presentasi Jhon Lusikoy mengenai peluang IJL dalam diskusi berkembanglah opsi-opsi yang cenderung dapat diterima baik oleh masyarakat maupun oleh Poso Energy. yang terdiri dari ;

Opsi	Kemungkinan
IJL diberikan melalui pemberdayaan Masyarakat ; peningkatan kapasitas (pelatihan) dibidang pertanian dan UKM oleh Poso Energi	Sangat Besar
IJL diberikan melalui kerjasama Rehabilitasi Lahan Kritis	Sangat Besar
IJL diberikan melalui kegiatan konservasi tanah	Besar
IJL diberikan melalui afirmasi produk desa yaitu kontrak pembelian hasil pertanian dan holtikultura dari desa oleh Poso Energi	Besar

IJL diberikan melalui pembayaran kompensasi bea siswa	Menurut PT Poso Energi sudah dilakukan
IJL diberikan melalui pembayaran kompensasi kepada desa dalam bentuk bantuan sosial (Rumah Ibadah dsb)	Menurut PT Poso Energi secara sporadis sudah dilakukan
IJL diberikan melalui pembayaran kompensasi kepada desa dalam bentuk penerimaan Hibah di dalam APB Desa	Cukup Besar
IJL diberikan melalui pembayaran kompensasi kepada keluarga Miskin sebagai prioritas	Kecil
IJL diberikan dalam bentuk listrik gratis	Kecil

Sesi dua : Lokakarya

- Peserta Lokakarya dibagi dalam group diskusi yang akan mempresentase hasil diskusi dimasing-masing group
- Perumusan rencana aksi ; pengelolaan danau Poso yang berkelanjutan.

Capaian :

- Adanya komitmen dari berbagai pihak dalam pengelolaan danau Poso yang berkelanjutan. Pihak yang dimaksud adalah ; Desa, swasta (PT Poso Energi), Lembaga Agama (GKST), Lembaga Pendidikan (SMA 6 Tentena, STT tentena), pemerintah Kabupaten, UPT KLHK (BPDAS L), DPRD Kab. Poso
- Adanya tim kerja dan rencana aksi pengelolaan danau Poso yang berkelanjutan.

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menysasar pada Arahan Strategis 1)

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
<i>Xenopoecilus poptae</i>	Penangkapan berlebihan dan kehilangan Habitat	Sebaran jenis ini terindikasi terkonsentrasi diantara koridor Dulumai dengan salukaia/meke. Kemungkinan dibagian selatan danau Poso juga terdapat distribusi yang besar. Berdasarkan laporan masyarakat (nelayan) jenis ini masih cukup melimpah, karena mudah ditemui dan sering terperangkap jaring nelayan	Laporan KBA Monitoring
<i>Caridina Sp</i> <i>(Udang air tawar)</i> - <i>Caridina acutirostris</i> - <i>Caridina caerulea</i> - <i>Caridina ensifera</i> - <i>Caridina longidigita</i> - <i>Caridina schenkeli</i>	Penangkapan berlebihan dan kehilangan Habitat	Belum diketahui dengan pasti, karena belum pernah dilakukan penaksiran Populasi. Namun, potensi lost habitat bisa ditekan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonversi tepian danau yang landai, yang pasang surutnya ditumbuhi rumput (Apoacea Sp)	Laporan KBA Monitoring
<i>Xenopoecilus poptae</i>			
<i>Caridina Sp</i> <i>(Udang air tawar)</i> - <i>Caridina acutirostris</i>			

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Caridina caerulea</i> - <i>Caridina ensifera</i> - <i>Caridina longidigita</i> - <i>Caridina schenkeli</i> 			
--	--	--	--

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Danau Poso	Pertisipasi masyarakat meningkat, munculnya areal-areal perlindungan baru, yang dapat menahan laju perubahan penggunaan lahan disekitar danau dan daerah tangkapan air.	2433	

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

	(CA, SM, TN, TNL TWA, TWAL, Tahura, KKLD, DPL)		
--	--	--	--

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas								Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa	
	Desa Dulumai		X	X							X	
Desa Salukaia		X	X							X		
Desa Sulewana		X	X							X		

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima	Jumlah Penerima
---------------	-----------------	-----------------

	Manfaat (Laki-Laki)	Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim	550	400
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal	550	400
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan	60	30
Peningkatan akses atas jasa lingkungan	550	400
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
Pelatihan pemetaan Partisipatif	15	0
Pelatihan Lobby dan Negosiasi	10	5
Asistensi Penyusunan Perdes	30	4
Asistensi Perencanaan Desa (RPJMDesa)	18	6
Asistensi BUM Desa	3	2
Lain-lain		
Total Penerima Manfaat	1.786	1.247

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Perdes RTRDesa	Desa	RTR Desa	Penetapan Areal Perlindungan Desa
Dokumen Perencanaan	Desa	RPJMDesa	Perencanaan Jangka Menengah Desa yang memuat kebijakan konservasi melalui pengelolaan SDA yang lebih baik dan areal perlindungan desa

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program, contoh : forum pengelolaan daerah tangkapan air, yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air.)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

V. PEMBELAJARAN

Strategi yang paling efektif adalah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan KBA. Strategi ini memiliki momentum, dimana otoritas desa dalam pengelolaan ruang meningkat, dan disaat yang sama, sumberdaya desa mengalami peningkatan sehubungan dengan adanya DD/ADD.

Strategi ini memungkinkan, efektivitas pengelolaan SDA meningkat, karena pihak yang bertanggungjawab atas kelestarian KBA semakin besar, sehingga kontrol dan pengendaliannya semakin kuat.

Pendekatan ini dimungkinkan berhasil oleh karena masyarakat di sekitar danau Poso, telah memiliki hubungan sosio – ekonomi yang demikian erat dengan ekosistem danau. Pada saat yang sama, mereka juga menyaksikan dan telah merasakan akibat buruk dari degradasi danau. Oleh karena itu upaya yang dipandang oleh masyarakat dapat mempertahankan atau memperbaiki ekosistem danau akan mendapat respon antusias dari masyarakat. Capaian ini akan lebih berkualitas apabila pendekatan yang dilakukan diimbui dengan Peningkatan pengetahuan dan nilai-nilai konservasi pada masyarakat.

Disamping itu, penyesuaian strategi perlu dilakukan dalam mendorong kolaborasi dengan sektor privat, apalagi jika diletakan dalam konteks IJL dan CSR. Perusahaan-perusahaan dengan skala investasi besar, baik yang bergerak disektor energi maupun pertambangan, cenderung memiliki sistem pengambilan keputusan yang panjang dan terpusat. Pada tingkat tapak, manajemen cenderung tidak efektif dalam mengambil keputusan. Keputusan yang ditetapkan juga longgar dan sewaktu-waktu bisa berubah jika tidak sejalan kebijakan pemilik perusahaan.

Penyesuaian strategi dapat dilakukan dengan membuka satu chanel komunikasi yang dapat terhubung dengan Manajemen di tingkat Pusat. Kunjungan langsung ke kantor pusat manajemen di jakarta, atau menggunakan mediator, yang memiliki hubungan langsung dengan manajemen pusat dapat dipertimbangkan sebagai cara. Konektor dimaksud dapat berupa individu yang memiliki akses, maupun forum/asosiasi CSR, yang memiliki otoritas dan mandat dari perusahaan-perusahaan untuk mengorganisasikan kegiatan CSR nya.

Oleh karena itu, didalam membangun negosiasi dengan Privat sektor, negosiasi sebaiknya dilakukan pada minimal 2 (dua) aras ; pada tingkat lokal dan nasional (pusat). Karena kedudukan penentu kebijakan sesungguhnya ada di Pusat.

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
-----	------------------------------	-----------------	--------	-------------

<p>Peningkatan perlindungan KBA melalui perluasan areal perlindungan berbasis Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapid Asesment - Pemetaan partisipatif - Memfasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang - Workshop Para Pihak - Pembentukan dan Pembekalan Tim representasi Desa - Study Skema imbal jasa lingkungan di danau Poso - Publikasi dan Kampanye proses dan hasil program melalui Pemberitaan Media <p>Hasil :</p> <p>a. Perubahan pengetahuan</p>	<p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Tidak Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil (masyarakat) Kurang Berhasil (PT Poso Energi)</p> <p>Berhasil (Masyarakat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Otoritas desa meningkat - Sistem sosial dan budaya masyarakat dalam bentuk kearifan tradisional pengelolaan danau masih kuat <p>dalam konteks PT Poso Energi struktur pengambilan keputusan yang</p>	<p>Adanya areal perlindungan baru disekitar danau Poso</p>	<p>Replikasi kedesa lain ditepian danau</p>
---	--	---	--	---

<p>b. Perubahan sikap</p> <p>c.</p> <p>d. Perubahan perilaku</p>	<p>Kurang Berhasil (PT Poso Energy</p>	<p>panjang menjadi penghambat. Disamping itu, keberadaan usaha yang belum <i>Establish</i> juga menjadi kendala dan alasan</p> <p>-</p>		
<p>Proses :</p> <p>a. Perencanaan</p> <p>b. Pelaksanaan</p>	<p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p>	<p>Melibatkan masyarakat dan mendapat legitimasi kuat dari tokoh-tokoh di kawasan danau terutama Tokoh/organisasi gereja</p>	<p>Meluasnya partisipasi dan kepedulian terhadap kelestarian danau poso</p>	<p>Untuk konteks Poso Pelibatan Tokoh agama tidak boleh diabaikan. Ada situasi sosial yang menyebabkan kepercayaan terhadap tokoh agama lebih kuat dibandingkan dengan tokoh lainnya</p>

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : Rp 225.180.400
- b. Pengeluaran : Rp 234.678.050
- c. Saldo : - Rp 9.497.650